

LINGKUNGAN HIDUP dan LIBERALISASI PERDAGANGAN GLOBAL
mendamaikan yang ‘tidak’ dapat damai
(Suatu Analisis Politik Internasional)

Ismah Tita Ruslin

Dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik

UIN Alauddin Makassar

Email: tee_ruslin@yahoo.com

Abstract

This writing describes a great rivalry between environmental and economical interests. When experts on environment are worried that free trade may create harm on natural resources as it has been allegedly blamed to bring about environmental disaster, the supporters of free trade are concerned that policies on environment may lead to huge breakdown in trading activities. Taken that to match the two might be difficult, if not impossible, this writing is trying to harmonize them. Through communicative action, the writer applies possibly compromised gaps, in order that our merely one world will continuously provide the needs of human beings for nowadays and for the future.

Keywords: environment, global trade, communicative action

A. Pendahuluan

Secara riil ada pemahaman bahwa bisnis perdagangan dan lingkungan hidup adalah dua kondisi yang tidak dapat berjalan secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya, salah satu harus dikorbankan demi eksisnya yang lain. Saat ini globalisasi dengan geliat liberalisasi perdagangan yang bermotif kapitalistik justru semakin menampakkan keberadaannya. Kondisi tersebut berarti ancaman besar bagi keberadaan lingkungan hidup yang nota-bene ancaman besar bagi keberlangsungan hidup manusia dimuka bumi.

Tata ekonomi dunia dewasa ini yang pro pasar (industrialisasi), kerap dianggap sebagai pemicu kerusakan lingkungan. Hillary French menyebutkan lebih dari seperempat perdagangan barang di dunia ini melibatkan barang-barang yang langsung diturunkan dari basis sumber daya alam yang menyangga perekonomian global.¹ Dan sebahagian besar negara-negara berkembang mendominasi ekspor barang-barang tersebut jika dibanding dengan negara-negara industri. Kondisi ini disamping menguntungkan karena

¹ Selengkapnya dalam Lester R. Brown, dkk, *Masa Depan Bumi*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia: 1993) Hal. 424

mendatangkan devisa, disisi lain negara-negara berkembang sangat rawan terhadap kerusakan sumber daya alam yang ditimbulkan oleh perdagangan yang berbasis sumber daya alam.

Sejak mengglobalnya masalah lingkungan, banyak yang memperdebatkan antara kepentingan ekonomi (GNP, pembangunan, industrialisasi) dengan kepentingan lingkungan yang bertujuan melindungi kualitas lingkungan sehingga tetap berada dalam batas-batas kemampuannya dalam mendukung kehidupan di atasnya. Jika *para* ahli lingkungan hidup khawatir bahwa perdagangan bebas akan merusak sumber daya alam, maka *para* penganjur perdagangan bebas cemas bahwa kebijakan lingkungan hidup justru akan membawa kerugian besar dalam perdagangan.

Disadari sepenuhnya bahwa mendamaikan keduanya kemungkinan merupakan *mission imposible*, namun betatapun kecil kemungkinannya, senantiasa diupayakan ada celah untuk melihat kedua hal yang bertentangan tersebut, termasuk bagaimana upaya untuk mendamaikan keduanya. Dalam tulisan ini penulis mencoba memanfaatkan celah-celah kompromi melalui wacana “*communicative action*” sebagai upaya kearah ekologis, hingga bumi kita yang jumlahnya cuma satu tetap bisa memenuhi kebutuhan di atasnya kini dan akan datang.

B. Liberalisasi Perdagangan Vs Ekologis

Isu liberalisasi perdagangan dunia mengemuka terutama sejak ditandatanganinya Putaran Uruguay dan setelah WTO (*World Trade Organizations*) menggantikan posisi GATT (*General Agreement on tariffs and Trade*). Dengan disahkannya organisasi perdagangan dunia tersebut maka perdagangan internasional dewasa ini telah memiliki suatu institusi dan bukan lagi hanya sebuah perjanjian belaka seperti halnya GATT. Sementara isu tentang lingkungan hidup mulai menggejala terutama sejak KTT Bumi di Rio De Janeiro pada tahun 1992 yang menghasilkan Agenda 21, diantaranya memuat program yang harus dilaksanakan (*action program*) dibidang lingkungan dan pembangunan.

Sejak tahun 70-an masalah lingkungan telah dirasakan umat manusia sebagai persoalan bersama yang menuntut pengelolaan bersama pula baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Bahkan sejak beberapa abad sebelumnya Al-Qur'an melalui surah Ar-Rum (30:41) telah memperingatkan akan kerusakan lingkungan yang muncul di muka bumi (darat dan laut) diakibatkan ulah manusia. Berbagai fenomena

seperti pemanasan global, lubang pada ozon, naiknya air laut, hujan asam justru kini menjadi sumber ketakutan manusia. Sampai disadari bahwa bumi yang hanya satu ini dimana kegiatan-kegiatan manusia didalamnya berikut dampaknya secara rapih terkotak-kotak dalam negara-bangsa, dalam sektor-sektor (energi, pertanian perdagangan) dan dalam bidang yang menarik perhatian (lingkungan, ekonomi, sosial). Pengkotak-kotakan itu akhirnya mulai mencair, seakan menghadapi musuh bersama bernama “krisis global” diantaranya krisis lingkungan, pembangunan dan energi.

Di tempat yang sama komitmen negara-negara, baik maju maupun negara berkembang untuk melestarikan lingkungan hidup global memang tidak diragukan, terbukti isu lingkungan hidup dan pembangunan pun menjadi agenda penting masyarakat internasional di forum regional dan multilateral sejak tahun 1972 yang diawali dengan konferensi internasional mengenai “Human Environment” di Stockholm, Swedia, hingga puncaknya di KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, dengan mengusung agenda 21, suatu cetak biru untuk keberlanjutan dan menjadi dasar dari strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Agenda 21 berisi langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh semua orang (negara) agar pembangunan yang dilakukan berkelanjutan, antara lain keterkaitan erat antara pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup, komitmen negara maju untuk meningkatkan kerjasama internasional melalui program peningkatan pembangunan di negara-negara berkembang. Sejak itu, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial.

Namun, apa yang diharapkan masih jauh dari kenyataan, kondisi lingkungan hidup global tidak mengalami perbaikan malah cenderung merosot dan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat bangsa-bangsa juga mengalami penurunan. Disisi lain komitmen tersebut selalu diwarnai konflik kepentingan yang terutama melibatkan negara-negara maju disatu pihak dan negara-negara berkembang dipihak lain. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak di Stockholm. Bagi negara maju persoalan lingkungan terutama disebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (*over exploitations*) dalam rangka pembangunan di negara-negara berkembang. Sedangkan bagi negara berkembang sumber permasalahan terutama ada pada negara-negara maju dengan revolusi industrinya, dengan gaya hidup

mewah dan boros telah menguras persediaan energi dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang masih berkuat pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya.

Hadirnya globalisasi, bercirikan satu diantaranya liberalisasi perdagangan yang mensyaratkan adanya kebebasan arus barang, jasa maupun investasi antar negara. Menyusul munculnya kebijakan pengurangan bahkan penghapusan hambatan tarif maupun non-tarif semakin menimbulkan keraguan besar, apakah era perdagangan bebas tersebut bisa paralel dengan komitmen lingkungan terutama di negara-negara berkembang yang sangat timpang dengan negara-negara maju.

Setidaknya ada dua hal yang sangat dikhawatirkan oleh negara berkembang.² *Pertama*, faktor lingkungan dianggap sebagai penghalang bagi perdagangan internasional oleh negara maju dengan adanya *ecolabelling* misalnya, serta penerapan ISO 14000, dan banyak lagi produk ramah lingkungan dengan dalih tekanan konsumen (*consumer's driven*). Menyusul dalam mekanisme WTO berlaku asas "national treatment" atau perlakuan nasional.³ Dengan prinsip ini maka persyaratan ketat di negara pengimpor dapat dijadikan alasan untuk menolak produk negara lain. *Kedua*, kekuatiran adanya relokasi industri maupun masuknya arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang demi menghindari persyaratan lingkungan yang relatif lebih ketat di negara-negara maju. Dalam hal ini dikuatirkan menjadi "*pollution havens*" (sampah polusi, tempat polusi). Dengan demikian liberalisasi perdagangan justru akan mengganggu upaya perlindungan kualitas lingkungan global.

Kamuflase Hijau dan Dilema Negara Berkembang

Sebagai contoh modus digambarkan oleh Jed Greer dan Kenny Bruno⁴, yakni sebuah produsen agrokimia besar memperdagangkan suatu pestisida yang sangat tinggi resiko bahayanya menyebabkan perdagangan pestisida dilarang, namun produsen itu tetapi menyebutkan bahwa mereka sedang membantu memberi makan keluarga yang lapar.

² dikutip dari INFO RIO+10, diterbitkan oleh Konphalindo dalam <http://www.pelangi.or.id/resources>, diakses pada tanggal 2 April 2007

³ Prinsip *National Treatment* tercantum dalam tiga persetujuan utama WTO (Pasal 3 GATT, Pasal 17 GATS dan Pasal 3 TRIPs), selengkapnya dalam *Sekilas WTO*, edisi ketiga, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI.

⁴ Jed Greer dan Kenny Bruno, *Kamuflase Hijau : Membedah Ideologi Lingkungan Perusahaan-Perusahaan Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 1999), hal. 1

Belum lagi sebuah perusahaan kayu menebang pohon dari hutan tropis alami, menggantinya dengan hutan buatan yang terdiri dari satu spesies asing dan menyebut proyek tersebut upaya “pembangunan hutan berkelanjutan”. Kondisi di ataslah yang mengantarkan Greer dan Bruno meneriakan “selamat datang di dunia kamuflase hijau”.

Lain lagi, Larry Summers, kepala Bank Dunia yang pada tahun 1992 memimpin pembentukan kerangka kerja secara intelektual dan ideologis terhadap isu-isu lingkungan yang akan dibahas dalam konferensi Rio. Melalui *World Development Report*, sebuah terbitan tahunan yang dipimpinnya, mengangkat tema “Pembangunan dan Lingkungan”, tema yang disesuaikan jelang perhelatan konferensi bumi di Rio de Janeiro. Laporan itu disebarkan ke seluruh dunia beberapa minggu sebelum KTT Bumi. Laporan berisi usaha-usaha para ekonom Bank Dunia untuk meyakinkan bahwa produksi ekonomi dunia dapat meningkat tiga setengah kali lipat dalam waktu kurang dari 40 tahun tanpa terjadi kerusakan lingkungan).⁵

Sayangnya, ketajaman pemikiran Summers mendadak hilang karena tenggelam dalam penulisan dokumen yang birokratis seperti *The World Development Report*. Kendati begitu, kita dapat melihat sebuah analisa instrumental yang “teliti” dan “jujur” tentang pasar dan lingkungan tanggal 12 Desember 1991 pada memorandum yang dibuat oleh Summers. Memorandum itu berisikan serangkaian komentar editorial mengenai rancangan laporan lain yang ditulis oleh ekonom-ekonom Bank Dunia diantaranya yang berjudul “*Global Economic Prospects*”. Di pertengahan memo tersebut, pada bagian yang diberi judul “*dirty Industries*”, Summers menyatakan sungguh ironis bahwa ekonom-ekonom Bank Dunia tidak mengajukan rekomendasi kebijakan yang serius. Dengan pernyataan itu, Summers berusaha mengajak beberapa staf Bank Dunia untuk mencari suatu kebijakan ekonomi yang lebih arif. “Ini hanya antara anda dan saya,” tulisnya di dalam memo, “bukankah Bank Dunia sudah tidak perlu lagi mendukung upaya pemindahan industri-industri yang berpolusi ke negara-negara kurang berkembang?”.⁶ Summers menyebutkan dua alasan untuk itu

Pertama, ukuran ekonomi konvensional mengenai biaya-biaya pencemaran bagi kesehatan publik dihitung berdasarkan pendapatan yang hilang akibat kematian dan penyakit yang menimpa para pencari nafkah. Jelasnya, kehilangan pendapatan dan GNP

⁵ INFO RIO+10, *Op-Cit*, Lihat juga Bank Dunia, *World Development Report 1992* (New York: Oxford University Press, 1992), 9-10.

⁶ *Ibid*

akibat kematian pada orang Mexico dan Ethopia adalah sangat rendah dibandingkan dengan kematian seorang pekerja Amerika Serikat atau Swiss. Jadi, "logika ekonomi dibalik kebijakan *dumping* limbah beracun ke negara-negara berupah rendah adalah tercela dan kita harus berani menanggung risikonya."

Kedua, Summers meneruskan logika yang sama: negara-negara yang tak tercemar lingkungan merupakan tempat yang logis untuk membuang polusi dan sampah karena biaya-biaya sampingan dan tambahan untuk membuang limbah di daerah yang sudah sangat tercemar adalah sangat tinggi. Di Benua Afrika, misalnya, di negara-negara yang berpenduduk jarang tergolong daerah yang sangat tidak tercemar, kualitas udaranya mungkin lebih baik dibandingkan dengan Los Angeles atau Mexico City. Namun sayang, perdagangan polusi udara dan sampah, meskipun itu meningkatkan "kesejahteraan dunia" yaitu, memindahkan limbah dari Los Angeles ke Zaire dalam sebuah transaksi pasar, ada motif "peningkatan kemakmuran" yang sangat klasik tentunya.

Pada akhirnya, tuntutan adanya suatu lingkungan yang bersih bagi alasan yang estetik dan sehat agaknya mempengaruhi elastisitas pendapatan yang sangat tinggi, yaitu, si miskin akan hidup dalam lingkungan yang kotor dan beracun yang dapat mempercepat kematian mereka.

Ada argumen lain yang membenarkan pembuangan limbah ke negara miskin. Secara implisit Summers menyatakan, udara bersih adalah barang mewah atau sekadar masalah "estetika", yang belum dibutuhkan oleh mereka yang miskin "sebagian besar perhatian mengenai limbah industri berkuat pada pengaruh-pengaruhnya di masa mendatang dan dampak langsung limbah tersebut terhadap kesehatan mungkin sangat sedikit".⁷ Pada kenyataannya, orang hanya perlu mengamati data statistik tentang penyakit radang saluran tenggorokan, asma dan pneumonia pada anak-anak di negara miskin yang sangat tercemar seperti Mexico City dan Sao Paulo untuk membuktikan dampak limbah tersebut. Walaupun bagi sebagian pelancong, limbah atmosfer itu tampak "estetik"; namun bagi sebagian besar orang yang mudah terserang penyakit, limbah itu menjadi ancaman terhadap hidup mereka sendiri.

Nampaknya warisan historis, berupa kemenangan negara-negara Eropa dalam perang dunia II merupakan modal bagi negara-negara tersebut untuk mengendalikan

⁷ *Ibid*

masalah-masalah internasional, termasuk lingkungan hidup yang dipopulerkan di Stockholm 1972.⁸ Kemudian berlanjut pada KTT Bumi di Rio de Janeiro yang merekomendasikan persoalan lingkungan dalam agenda perdagangan internasional.

Mengglobalnya isu lingkungan telah menempatkan negara berkembang pada posisi dilematis antara mendahului kepentingan ekonominya atau kepentingan lingkungannya. Disatu sisi kepentingan ekonomi sangat mendesak untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sejak tahun 1970 kebanyakan negara berkembang yang bukan pengekspor minyak mengalami kenaikan biaya impor tanpa diikuti oleh meningkatnya biaya ekspor, ambisi ekspor negara berkembang semakin sering terbentur pada batas-batas yang digariskan oleh negara Industri. Sementara beberapa negara berkembang sangat mengharapkan masuknya devisa dari hasil perdagangan internasional.⁹ Dan ketika mereka berfikir untuk kepentingan lingkungannya misalkan upaya mengadopsi daur ulang limbah pabrik tentu membutuhkan suatu teknologi, berarti bertambah cost dalam biaya produksinya. Melimpahnya cost akan berdampak pada mahalnya produk / barang dan mengurangi daya saing di pasaran. Sementara bila cost dibebankan pada produsen tentu saja akan mengurangi keuntungan yang diperoleh.

Hal yang sama sebenarnya juga dialami oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar di negara-negara industri, kepeduliannya terhadap lingkungan dimanifestasikan dengan menerapkan standarisasi lingkungan yang cukup ketat diantara sesama negara industri, dan juga akan mengalami penambahan cost pada proses produksinya akibat kepentingan lingkungan, terutama untuk jenis industri yang berbasis pada SDA maupun yang berpotensi mengeluarkan polusi misalnya industri-industri kimia. Namun untuk mengurangi beban biaya tersebut, beberapa perusahaan di negara industri justru “terbang” ke negara-negara berkembang yang notabene kebijakan standar lingkungannya lumayan longgar. Di negara berkembang kedatangan industri tersebut disambut “hangat” oleh sebagian kalangan tentunya. Kita ambil contoh di Indonesia hadirnya PT. Indo Rayon yang merupakan relokasi industri asing dengan motif yang disinyalir merupakan pengalihan “dirty industries” atau

⁸ Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, (Jakarta: Yayasan As-syahidah: 1998). Hal 90-91

⁹ Rudolf H. Strahm, *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, (Jakarta: CIDES: 1999), Hal. 122-125

industri-industri kotor dimana jenis industri yang secara normal mengemisikan relatif lebih besar zat-zat pencemar dibandingkan industri bersih.

Kondisi semakin parah ketika paradigma globalisasi semakin keras gaungnya. KTT Bumi yang dilaksanakan pada saat globalisasi dimana liberalisasi ekonomi juga semakin pesat perkembangannya. Hal ini nampak ketika jargon pembangunan berkelanjutan yang digagas di Rio hingga ke Johannesburg harus bersaing kuat dengan paradigma globalisasi, *summit to summit* pun hanya terkesan sebagai *symbolic statement* yang kental dengan nuansa politis, disamping operasionalisasinya tetap di “godog” di badan-badan khusus berdasarkan permasalahannya juga nampak dominasi negara-negara maju terkesan memaksakan kehendak untuk kepentingannya dan “menodai” pembangunan berkelanjutan.

Apa artinya persaingan pembangunan berkelanjutan versus globalisasi ekonomi ini bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya *gap* Utara-Selatan semakin melebar sementara semangat Rio tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk diterjemahkan dalam tindakan nyata. Hanya lima negara utara yang memenuhi target 0,7 % dari GNP sebagai bantuan melaksanakan agenda 21, alih teknologi tidak pernah terjadi.¹⁰ Komitmen memperbaiki lingkungan tidak pernah dilaksanakan. Bahkan Amerika Serikat (AS) menolak kesepakatan Protokol Kyoto sebagai pelaksanaan bagi konvensi perubahan iklim, karena memuat target waktu dan penurunan emisi gas rumah kaca yang jelas, begitupun dengan PBB tentang keragaman hayati, AS tidak mau menandatangani konvensi tersebut. Diperkirakan, konvensi tersebut mengandung risiko besar pada perkembangan ekonomi AS yang bersandar pada industri bioteknologi.¹¹

Sementara itu PBB, organisasi yang diberi mandat mengatur pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui *Commission on Sustainable Development* (CSD) yang dibentuk di KTT bumi, mengalami proses pelemahan karena negara utara menolak membayar penuh iuran mereka.¹² PBB tidak mendapatkan dukungan politik dari negara maju. Sebaliknya institusi keuangan seperti IMF dan bank Dunia, atau institusi perdagangan WTO semakin dipentingkan oleh negara maju sebagai organisasi yang dapat mengatur

¹⁰ Kompas, 27 Mei 2002

¹¹ Kompas, 29 Mei 2002

¹² Hira Jhamtani, Jalan Panjang Rio 1992 Menuju Johannesburg 2002, dikutip dalam *Wacana*, Insist, Edisi XII, 2002, hal. 157

pembangunan internasional. PBB semakin mengalami krisis legitimasi, dan negara maju selalu memiliki posisi tawar yang kuat dan negara berkembang akan tetap berada pada lingkaran setan.

Upaya Mendamaikan

Perdebatan yang terjadi dalam wacana perdagangan dan lingkungan pada prinsipnya bersumber pada idealisme yang berbeda. Kelompok perdagangan utamanya perdagangan bebas berangkat dari idealisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Kepentingan seperti ini menghalalkan segala cara termasuk mengeksploitasi SDA secara berlebihan. Untuk itu hambatan-hambatan ekologis dianggap sangat merugikan kepentingannya. Sementara kaum environmentalis berangkat dari idealisme untuk menjaga lingkungan, agar tetap harmonis dengan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Mereka menolak cara-cara seperti pengeksploitasian alam besar-besaran akibat tuntutan industrialisasi.

Konflik selanjutnya antara negara-negara maju dan berkembang akibat penerapan standar yang berbeda, negara maju dengan standar lingkungan yang sangat ketat sementara negara berkembang umumnya menggunakan standar yang cenderung lebih longgar. Sebagai contoh para petani jeruk citrus di Meksiko harus menelan kekecewaan ketika AS mengeluarkan persyaratan agar jeruk-jeruk tersebut menjalani pemeriksaan "citrus kanker" padahal penyakit tersebut sudah lama dimusnahkan.¹³ Mereka menganggap tindakan ini hanya merupakan hambatan perdagangan terselubung. Kecurigaan juga kerap kali muncul diantara sesama negara industri, pemerintah-pemerintah saling curiga adanya proteksionisme terselubung dalam mantel lingkungan. Misalnya, AS berpendapat bahwa larangan di Eropa terhadap daging yang dihasilkan dengan hormon pertumbuhan ternak sesungguhnya merupakan usaha melindungi para produsen ternak di Eropa terhadap persaingan AS serta Pajak Ontario terhadap semua minuman beralkohol yang dijual dalam wadah yang tidak dapat diisi lagi sebenarnya dibuat bukan demi alasan lingkungan hidup melainkan untuk menggeser bir AS.¹⁴

Konflik-konflik yang terjadi antara negara-negara maju, berkenaan dengan isu persaingan menjadikan negara-negara berkembang sebagai tumbal, akibat penerapan

¹³ Lester R. Brown, *Op-Cit*, hal. 454

¹⁴ *Ibid*

standar yang ketat diantara mereka. Negara maju kemudian “melemparkan” industrinya ke negara berkembang, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya untuk meningkatkan pendapatan negara disambut hangat oleh negara berkembang, tanpa menyadari kerugian ekologis yang ditimbulkannya. Belum lagi problem di negara maju akibat *over lapping* ampas pemanfaatan SDA akibat keserakahan kapitalisnya melalui industrialisasinya.

Para ahli lingkungan hidup menekankan perlunya sesekali menggunakan sarana-sarana pembatas perdagangan untuk mencapai sasaran-sasaran lingkungan hidup yang penting. Dengan kata lain *bagaimana menuju perdagangan yang lebih hijau*.

Communicative actions

Jurgen Habermas melalui teorinya menyatakan bahwa interaksi antar aktor tidak selalu didorong oleh kepentingan material, melainkan dari suatu proses intelektual yaitu *communicative action*.¹⁵ Argumen yang dikeluarkan bukanlah berorientasi pada hasil “sukses atau tidaknya” melainkan pada suatu pemahaman umum. Dimana kepentingan dan preferensi suatu negara berubah bukan karena kondisi material (*realis*) atau *society actor* (*liberal*), melainkan karena adanya pemahaman dan kesadaran bersama melalui “intersubjective meaning”.¹⁶ Dengan *communicative action*, adanya kesediaan aktor (negara-negara) untuk menerima asumsi tertentu sehingga mau merubah kepentingannya dalam arti “benar-benar merubah”, melalui pola-pola yang dapat mengkonstruksikan identitas mereka yang kemudian diintegrasikan dalam hubungan antar negara, maka identitas ini akan berafiliasi dengan identitas negara-negara lain dalam struktur internasional yang akhirnya mempengaruhi negara melakukan sesuatu (ada “kemungkinan” perubahan identitas), sehingga ada perubahan tindakan dan melahirkan kebijaksanaan suatu negara.

Kondisi Hubungan Internasional yang terformat dalam “Common Life World” (CLW) hadir dalam wilayah regional, geografi, dan isu. Melalui mekanisme institusionalisasi tingkat tinggi, misalnya regional Uni Eropa, AFTA atau wilayah isu misalnya perdagangan atau lingkungan. Upaya untuk menghidupkan terus menerus CLW akan muncul jika ada

¹⁵ Selengkapnya dalam, Thomas Risse, *Let's Argue: Communicative Action in World Politics*, International Organization 54,1 Winter 2000, p. 1-39

¹⁶ Selengkapnya melalui Analisa Wendt, Onuf, dan Kratochwill dalam Maja Zehfus, *Constructivism in International Relations*, (UK:Cambridge University Press, 2002)

beberapa aktor (negara) yang terus menerus membicarakan suatu isu tertentu, dalam dunia HI dikenal dengan “norm entrepreneur” mekanisme yang terus menerus menyuarkan suatu isu tertentu hingga akhirnya menjadi norma yang ditaati oleh negara-negara. Pemunculan norma berasal dari orang (individu, negara, LSM) yang kemudian masuk menjadi perdebatan negara yang kemudian diperjuangkan. Kalau norma itu sudah diterima, maka akan ada penerapan norma-norma itu diseluruh negara.

Hal ini harus senantiasa di implementasikan oleh para ahli ekonomi dan ahli lingkungan pada umumnya bahwa salah satu kunci menuju perdagangan yang berkelanjutan menurut lingkungan hidup adalah mengusahakan agar produksi mencerminkan biaya lingkungan hidup sepenuhnya. Kalau biaya-biaya ini diperhitungkan oleh seluruh negara, maka perdagangan merupakan sarana yang efisien untuk membagikan sumber daya ke seluruh dunia.

Adanya pemahaman bersama dari para aktor akan menjadi satu upaya menjembatani gap ini, misalnya pencantuman biaya melalui pajak lingkungan hidup atau pajak pada energi akan menolong membatasi biaya-biaya perdagangan lingkungan hidup dengan cara mendorong penggunaan transportasi yang paling hemat energi atau pajak pada kayu dari hutan primer akan mendorong penggunaan kayu yang dibudidayakan, dengan demikian mengurangi pengaruh perdagangan kayu gelondongan yang “rakus” pada penggundulan hutan. Meski tidak semudah pelaksanaannya dimana sejak awal negara industri biasanya lebih berhasil daripada negara berkembang dalam menentukan harga produk ekspor mereka yang mencerminkan perhitungan biaya kerusakan lingkungan dan pengendalian kerusakan tersebut. Misalnya kasus ekspor dari negara Industri, biaya-biaya dibayar oleh konsumen di negara pengimpor, termasuk di negara berkembang. Akan tetapi biaya ekspor negara berkembang tetap dibayar dalam negeri, sebagian besar dalam bentuk biaya kesehatan, harta milik dan ekosistem.¹⁷

Jalan lain menuju perdagangan lebih hijau sebenarnya adalah penetapan standar / pencantuman label lingkungan seperti program *malaikat biru* di Jerman atau *cap hijau* di AS, kenyataannya negara-negara lebih memilih tingkat perlindungan yang sangat berbeda dan berbeda pula dalam penegakannya. Adanya kekhawatiran kerugian akan lebih besar pada

¹⁷ Selengkapnya dalam Laporan Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan : *Hari Depan Kita Bersama*, (Jakarta: PT Gramedia:1988), Hal. 114

pihak produsen karena terpaksa memenuhi peraturan yang lebih ketat dari para pesaingnya. Misalnya rencana-rencana masyarakat Eropa untuk mengenakan pajak karbon sedang dihambat oleh ketakutan akan kerugian yang kompetitif jika Jepang dan AS tidak melakukan tindakan yang serupa.¹⁸

Titik-titik kompromi sebagai desain operasional akan semakin banyak, bila mengacu pada paham *hyperglobalis* dan kondisi global yang *borderless*, dimana dalam perdagangan “bargaining body” tidak lagi mutlak pada negara tapi terletak pada hubungan konsumen dan produsen. Dengan asumsi biaya penanganan lingkungan, polusi misalnya di tanggung oleh konsumen. Dengan memanfaatkan instrumen seperti norma, argumen dan visi sebagai *basic mainstreamnya* dari masing-masing individu (konsumen) dalam menentukan kepercayaannya terhadap produk yang akan dikonsumsi.

Fenomena *green consumerism* adalah celah lainnya, serta adanya kebutuhan akan *cleaner production*, menghadirkan kompetisi para produsen dalam menarik simpati dari konsumen dengan jargon ‘moralitas’ dengan kata lain tetap berpostur kapitalis tapi bagaimana tetap menggiring dalam nuasa ‘hijau’. Namun perdagangan akan terus merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang masih saja dipersoalkan, sementara itu peraturan-peraturan semakin banyak dan hanya akan menjadi alat bagi yang semakin perkasa dalam memainkan perannya.

Dalam perkembangannya WTO telah mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai lingkungan hidup dalam Pasal XX ayat (b) dan (g) GATT untuk penegakkan hukum lingkungan agar fungsi lingkungan tetap lestari. Namun, ketentuan tersebut pada kenyataannya tidak menjadikan lingkungan menjadi lebih baik bahkan makin menimbulkan masalah lingkungan hidup global. Selain itu, penetapan standar lingkungan dalam perdagangan bebas menjadikan negara berkembang tidak dapat bersaing di pasar bebas karena tidak dapat memenuhi standar lingkungan hidup yang diisyaratkan bagi transaksi dalam perdagangan bebas.

Meski titik-titik kompromi umumnya masih didominasi oleh kalangan konvensional mengingat “image” perdagangan (Bretton woods) dan lingkungan (Stocholm) yang sejak awal mula senantiasa “disetir” dan bermuara di negara-negara maju. Namun satu yang

¹⁸ Lester S, Brown, *Op-Cit*, Hal 469

tetap dan harus selalu ada bahwa, kapan, dimanapun, dan bagaimanapun wacana ekologis harus terus-menerus dikonstruksikan paling tidak meminimalisir kerusakan lingkungan yang merupakan “titipan anak cucu kita”. Masih ada celah tanpa lagi harus berfikir sinis atau mungkin ‘sembrono’ mengatakan bahwa si miskin di negara berkembang dapat lebih baik jika tidak pernah lagi bersentuhan dengan semua ‘bantuan’ si kaya negara maju.

V. Penutup

Globalisasi hadir menggiring tata ekonomi dunia untuk lebih pro kepada pasar dan meminggirkan keberadaan lingkungan. Melalui mekanisme *Communicatve Actions*, beberapa upaya-upaya ditawarkan sebagai “way out” bagi permasalahan yang sarat dengan konteks eksploitasi bagi negara maju terhadap negara berkembang lalu menggiringnya dalam perdagangan hijau, penetapan biaya lingkungan hidup, standarisasi *ecolabelling*, dan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan negara berkembang, serta bantuan finansial dan teknologi.

Kesadaran para aktor diharapkan menghadirkan dan mengembangkan teknologi bersih bagi diri mereka sendiri maupun bagi lingkungan mereka, serta menurunkan sedikit ego akan pola-pola keinginan (konsumerisme) yang cenderung merusak lingkungan. Dalam hal ini negara berkembang setidaknya memiliki posisi tawar dengan keanekaragaman hayati dan hutan-hutan dunia.

Mulailah berfikir bagaimana mengubah cara mencapai pertumbuhan ekonomi, atau meningkatkan pendapatan yang tidak mesti hanya lewat jalur ekonomi atau bisnis semata, tetapi juga lewat pemanfaatan jalur sosial dan lingkungan. Artinya faktor biaya lingkungan dan sosial harus masuk ke dalam biaya produksi, karena selama ini biaya lingkungan dan sosial kerap diberikan ke rakyat. Inilah bentuk baru ekonomi pembangunan yang disebut ekonomi berkelanjutan. Dan sekali lagi jangan pernah berhenti untuk membicarakannya.

Daftar Pustaka

Brown, Lester, R dkk, *Masa Depan Bumi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993

Direktorat Perdagangan dan Perdagangan Multilateral Kementerian Luar Negeri, *Sekilas WTO*, Edisi Ketiga

Greed, Jed dan Kenny Bruno, *Kamuflase Hijau: Membedah Ideologi Lingkungan Perusahaan-Perusahaan Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999

Jamtani, Hira, *Jalan Panjang Rio 1992 Menuju Johannseburg 2002*, Wacana, Insist, Edisi XII, 2002

Sudjana, Eggi, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, Yayasan As-syahidash, Jakarta, 1998

Strahm, Rudolf, H, *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, CIDES, Jakarta, 1999

Risse, Thomas, *Let's Argue: Communicative action in world Politics*, International Organization 54,1 Winter 2000, The IO Foundation and The Massachusetts Intitute of Technology

Zehfus, Maja *Constructivism in International Relations*, Cambridge University Press, UK, 2002

Laporan Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan : *Hari Depan Kita Bersama*, PT Gramedia, Jakarta, 1988

UNDP, *Human Development Report 1992*, New York dan Oxford: Oxford University Press, 1992

Kompas , 27 Mei 2002

Kompas, 29 Mei 2002

<http://www.pelangi.or.id/resources>.